

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Penerapan Pasal 170 KUHP dalam Putusan Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn**

Paparan perkara tindak pidana kekerasan secara bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn dengan Terdakwa Sukirno alias Cubung :

##### **1. Kasus Posisi**

Singkat cerita tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut telah melibatkan sedikitnya 9 (sembilan) orang pelaku yang antara lain Sukirno alias Cubung (25), Agus Irawan alias Kuncung (21), Hari Wibowo (18), Rizki Dwi Santoso (18), Denda Agus Lutfianto (18), Deo Kurniawan alias Slendup (22), Surya Andika alias Dika alias Sun (19), Rijalul Muhyidin alias Jalul dan Enggar Setyawan (17) dengan 2 (dua) orang korban yang antara lain Dodik Irawan alias Kastam (20) dan Alm. Devi Pra Oktarifianto (28). Tindak pidana kekerasan secara bersama tersebut juga mengakibatkan salah satu korban yang bernama Alm. Devi Pra Oktarifianto meninggal dunia.

Tindak pidana kekerasan secara bersama ini disebabkan karena salah satu pelaku yang bernama Agus Irawan pernah dikeroyok oleh salah satu korban yang bernama Alm. Devi Pra Oktarifianto dan menyimpan dendam kepada Alm. Devi Pra Oktarifianto. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 04.00 WIB

ketika Agus Irawan bersama teman-temannya sedang berkumpul di depan tempat makam pahlawan dan melihat korban bersama teman-temannya yang juga sebagai korban berada di seberang jalan. Kemudian Agus Irawan mengajak teman-temannya untuk memukul korban dan teman-temannya menyetujui ajakan dari Agus Irawan. Namun Agus beserta teman-temannya tidak serta merta langsung memukul korban, Agus mengunjungi kakaknya yang bernama Sukirno untuk memberitahukan akan keberadaan korban. Sesaat setelah Agus menemui Sukirno dan memberitahukan keberadaan korban maka Sukirno mengajak Agus untuk menghampiri korban. Sesaat setelah Agus dan Sukirno beserta teman-temannya yang merupakan sebagai pelaku telah berkumpul untuk melakukan kekerasan secara bersama. Kemudian para pelaku datang menghampiri korban dan langsung melakukan kekerasan secara bersama terhadap korban yaitu Dodi Irawan alias Kastam dan Alm. Devi Pra Oktarifianto.

Dodi dikeroyok oleh Agus, Hari, Rizki dan Denda. Agus memukul Dodi dibagian wajah sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul bagian tengkuk leher sebanyak beberapa kali, Hari menendang Dodi, Rizki memukul lengan kiri Dodi sebanyak satu kali, dan Denda memukul bagian punggung Dodi dengan menggunakan kayu ke bagian punggung dan kepala bagian belakang lebih dari dua

kali, menendang kearah bagian punggung dan kepala, dan memukul sebanyak dua kali dengan papan kearah punggung.

Sedangkan Alm. Devi Pra Oktarifianto dikeroyok oleh Deo Kurniawan alias Slendup dengan cara dipukul dari belakang dengan menggunakan 1 buah kayu usuk 4x6 dobel kearah kepala sebanyak lebih dari dua kali sehingga membuat Alm. Devi melarikan diri. Denda Agus Lutfianto memukul Alm. Devi dari depan dengan menggunakan 1 buah kayu papan sebanyak 2 kali kearah kepala sehingga mengakibatkan Alm. Devi melarikan diri kearah barat. Surya Andika alias Dika alias Sun memukul Alm. Devi saat sempoyongan dari belakang dengan tangan kosong kearah punggung sebanyak 1 kali. Sukirno alias Cubung memukul Alm. Devi secara keras dari arah samping kearah kepala yang membuat Alm. Devi sempoyongan dan masih berusaha melarikan diri masuk ke gang. Kemudian Deo Kurniawan alias Slendup melemparkan 1 buah kayu usuk 4x6 dobel kearah kaki Alm. Devi sehingga membuatnya terjatuh. Saat Alm. Devi terjatuh kemudian diseret oleh Rijalul Muhyidin alias Jalul menghantamkan kepala Alm. Devi dengan menggunakan 1 bongkahan cor kearah kepala bagian belakang Alm. Devi sebanyak 1 kali saat tubuh Alm. Devi dalam posisi tidur miring ke kanan. Kemudian melemparkan 1 bongkahan cor tersebut ke arah kaki Alm. Devi. Kemudian menendang Alm. Devi dengan menggunakan kaki kanan pada perut bagian samping kanan. Enggar Setyawan mengambil kayu

yang sebelumnya dipakai oleh Deo Kurniawan dan memukul keras tubuh Alm. Devi sebanyak 4 kali (kearah kaki 1 kali, kearah punggung 1 kali, kearah kepala 2 kali). Setelah kekerasan secara bersama terjadi, para pelaku berusaha kabur meninggalkan lokasi kejadian.

## **2. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Sukirno  
 Tempat Lahir : Malang  
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Nopember 1981  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT.09 RW.04 Ds.  
 Ngroto, Kec. Pujon, Kab. Malang  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Satpam  
 Pendidikan : -

## **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Sukirno dengan dakwaan alternatif subsidiaritas sebagai berikut :

a. Kesatu;

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

b. Kedua;

1) Primair :

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

2) Subsidair :

Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair :

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa SUKIRNO Alias CUBUNG bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Dodik Irawan alias Kastam;

- 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm;
  - 1 (satu) buah bongkahan cor dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg;
  - 1 (satu) buah kayu usuk 4x6 dobel dengan panjang sekira 90 (Sembilan puluh) cm;
  - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau tua ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna putih striping biru Nopol.N-5380-LV an. Istiah.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Istiah ;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

##### **5. Pledoi (Pembelaan)**

Pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, yang berhubungan dengan materi surat dakwaan yaitu menyangkut :

1. Bahwa menurut Terdakwa melalui kuasa hukumnya Terdakwa tidak terlibat dalam Perkara;
2. Bahwa oleh karena terdakwa tidak terlibat dalam Perkara maka Terdakwa melalui kuasanya bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada terdakwa Sukirno Pembebasan dari semua dakwaan (vrisspak) atau sebanyak-banyaknya pelepasan dari semua tuntutan hukum (onslag van

alle rechovermor) kepada terdakwa Sukirno dan mengembalikan derajat dan harkatnya sebagai pribadi yang tidak bersalah yang telah tercemar oleh adanya tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum dihadapan sidang pengadilan;

## **6. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusannya Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa;
  1. Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatanya dipertimbangkan secara hukum;
  2. Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan

dipersidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

3. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di depan toko mebel / kayu Jl. Abdul Manan Wijaya Dusun Krajan Ds. Ngroto Kec. Pujon Kab. Malang, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Dodik Irawan Als Kastam dan Alm. Devi Pra Oktarifianto ;
- Bahwa cara melakukan pengeroyokan terhadap korban Dodik Irawan Als Kastam dan Alm. Devi Pra Oktarifianto adalah pada awalnya saksi Dodik Irawan Als Kastam, Alm Devi Pra Oktarifianto,



saksi Suhariono als Pardi dan saksi Sukron Rafianto yang berada di depan toko Mebel didatangi oleh saksi Hari Wibowo dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Dodik Irawan Als Kastam, sedangkan Alm. Devi Pra Oktarifianto, yang pertama melakukan pemukulan adalah saksi Deo Kurniawan Als. Slendup dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu usuk 4X6 dobel kearah kepala Alm. Devi Pra Oktarifianto sebanyak lebih dari dua kali, dan Alm. Devi Pra Oktarifianto melarikan diri kemudian disusul oleh saksi Denda Agus Lutfianto dengan memukul dari depan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu papan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala, selanjutnya Alm. Devi Pra Oktarifianto berusaha melarikan diri kearah barat, dalam keadaan sempoyongan Alm. Devi Pra Oktarifianto dipukul dengan tangan kosong dari belakang oleh saksi Surya Andika ALs Dika Als Sun kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah samping terdakwa Sukirno Als. Cubung memukul dengan tangan kosong dengan keras kearah kepala yang membuat Alm. Devi Pra Oktarifianto sempoyongan ;

- Bahwa selanjutnya Alm. Devi Pra Oktarifianto masih berusaha melarikan diri masuk gang dan bersamaan masuk gang tersebut saksi Deo Kurniawan als Slendup melemparkan 1 (satu) buah kayu usuk 4X6 dobel kearah kearah kaki Alm. Devi Pra Oktarifianto hingga Alm. Devi Pra Oktarifianto terjatuh dan saat terjatuh di gang tersebut tubuh Alm. Devi Pra Oktarifianto diseret oleh saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul kemudian saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul mengambil 1 (satu) buah bongkahan cor didekat tiang listrik langsung saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul langsung menghantam/pukulkan kearah kepala bagian belakang Alm. Devi Pra Oktarifianto sebanyak satu kali saat tubuh Alm. Devi Pra Oktarifianto dalam posisi tidur miring ke kanan, setelah itu saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul melemparkan batu cor tersebut kearah kaki Alm. Devi Pra Oktarifianto, dan kemudian saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul menendang Alm. Devi Pra Oktarifianto dengan menggunakan kaki kanan pada perut bagian samping kanan dan yang terakhir saksi Enggar Setyawan mengambil 1 (satu) buah kayu usuk 4X6 dobel yang

sebelumnya dipakai saksi DEO KURNIAWAN Als. SLENDUP, langsung digunakan untuk memukul dengan keras tubuh Alm. Devi Pra Oktarifianto sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing kearah kaki sebanyak satu kali, kearah punggung sebanyak satu kali dan kearah kepala sebanyak dua kali;

- Bahwa saat pemukulam yang dilakukan oleh terdakwa Sukirno Als. Cubung dan saksi Agus Irawan alias Kuncung, saksi Rizki Dwi Santoso, saksi Hari Wibowo, saksi Denda Agus Lutfianto, saksi Rijalul Muhyidin, saksi Deo Kurniawan alias Slendep, saksi Suryandika alias Sun, saksi Enggar Setyawan (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) (yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), saksi korban Dodik Irawan als Kastam tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya menunduk dan kedua tangannya melindungi kepala sedangkan Alm. Devi Pra Oktarifianto saat itu juga tidak melakukan perlawanan hanya berteriak “sudah.. sudah..’.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sukirno Als. Cubung bersama saksi Rizki Dwi Santoso, saksi Hari Wibowo, saksi Denda Agus Luthfianto, saksi Rijalul

Muhyidin, saksi Deo Kurniawan alias Slendep, saksi Suryandika alias Sun, saksi Enggar Setyawan (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa saat itu saksi Rijalul Muhyidin Als Jalul sambil membantu mendorong sepeda motor milik saksi Deo Kurniawan alias Slendup, sedangkan sepeda motor milik Ahmad Firliansyah alias Simad ditinggal didekat TMP, kemudian semuanya menuju kerumah Saksi Odniel Bruri Pranata alias Cingcing akan tetapi pada saat menuju ke rumah saksi Odniel Brunu Pranata alias Cingcing, saksi Agus Irawan alias Kuncung, saksi Rizki Dwi Santoso, saksi Hari Wibowo, saksi Denda Agus Lutfianto, saksi Rijalul Muhyidin, saksi Deo Kurniawan alias Slendep, saksi Suryandika alias Sun, saksi Enggar Setyawan (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa Sukirno alias Cubung yang saat itu sudah tidak menggunakan cadar dan saat itu terdakwa Sukirno alias Cubung mengatakan “oyo kondo sopo-sopo masalah iki (pengeroyokan)”;

- 2) Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi Sukron Rafianto, saksi Dodik Irawan Alias Kastam, saksi Suhariono alias Pardi, saksi Odniel Bruri Pranata, dan saksi Achmad Wahyu Adimas Putra membenarkan dan yakin bahwa pada saat terjadinya kejadian pengeroyokan ada orang yang menggunakan cadar dan sepatu boot warna hijau yang ikut memukul korban Devi Pra Oktarafianto dan korban Dodik Irawan alias Kastam bahwa orang tersebut para saksi yakini adalah terdakwa Sukirno alias Cubung ,para saksi yakin berdasarkan ciri-ciri fisik terdakwa Sukirno alias Cubung dan ketika ditunjukkan sepatu boot warna hijau yang dihadirkan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa sepatu boot tersebut adalah miliknya dan ketika terdakwa di suruh untuk mencoba sepatu boot tersebut ukurannya pas dengan kaki terdakwa Sukirno alias Cubung sehingga keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan adanya petunjuk bahwa sepatu boot yang telah di coba oleh terdakwa di depan persidangan merupakan sepatu yang digunakan oleh terdakwa ketika ikut melakukan kegiatan pengeroyokan menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan dan terdakwalah salah satu pelakunya, sehingga menurut pendapat Majelis hakim

bahwa keterangan para saksi tersebut termasuk alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 KUHP;

3) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan maut.

1) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan Devi Pra Oktarifianto meninggal dunia berdasarkan hasil VER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 15.018/I tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ngesti Lestari, SH, SpF (K) selaku dokter Spesialis Forensik yang telah menyimpulkan dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia oleh karena pendarahan pada batang otak, pendarahan di bawah selaput laba-laba otak, pendarahan di bawah selaput tebal otak, karena patah tulang atap dan dasar tengkorak akibat kekerasan benda tumpul pada kepala ;

2) Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat

(2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**7. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusannya Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn tanggal 28 Juli 2015, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa SUKIRNO alias CUBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati" sebagaimana dalam dakwaan kedua primer ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket warna biru dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dodik Irawan alias Kastam;
  2. 1 (satu) buah kayu papan dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm ;
  3. 1 (satu) buah bongkahan cor dengan berat kurang lebih 6 (enam) kg ;
  4. 1 (satu) buah kayu usuk 4x6 dobel dengan panjang sekira 90 (Sembilan puluh) cm ;
  5. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih striping biru Nopol. N-5380-LV atas nama Istiah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Istiah ;
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

## **8. Pembahasan**

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan di tempat yang terbuka dan secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 170 KUHP.

Namun maksud pembentuk undang-undang membentuk ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu,



jika melihat kedalam *Code Penal*<sup>52</sup> yang berlaku di Prancis, maka di antara kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap hak-hak milik itu, di dalam Pasal 440 *Code Penal* orang akan menjumpai suatu ketentuan pidana yang mengatur masalah tindak pidana merampok secara beramai-ramai yang disebut *commis en reunion ou bande et a force ouverte*, yakni sejenis dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 528 jo. 529 dari *Code Penal* yang pernah diberlakukan di negara Belanda. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman ternyata orang telah mengaturnya di dalam Paragraf 125, yang didalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga disebut sebagai *Land friedensbruch*, yakni sebagai tindak pidana melanggar ketertiban umum (*openbare orde*), berupa keturutsertaan dalam suatu huru-hara yang dilakukan secara terbuka oleh sejumlah besar manusia, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang dan barang-barang. Pembentuk undang-undang pidana Jerman, dengan mengatur masalah yang sama dalam Buku II Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni dalam Pasal 170 KUHP.<sup>53</sup>

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang

---

<sup>52</sup> *Code Penal* secara etimologis berasal dari bahasa latin *codexpoenalism* adalah undang-undang pidana. *Code* adalah suatu kumpulan hukum tertulis yang disusun secara sistematis, logis, disertai indeks dan daftar isi yang meliputi satu atau lebih bidang hukum. *Penal* artinya hal-hal yang menyangkut pembedaan. Dalam <http://arti-definisi-pengertian.info>. Diakses 20 Maret 2017.

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 348.

sering terjadi di tanah air sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan yang tidak puas terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang. Dalam kerusuhan-kerusuhan seperti itu sering kali terdapat banyak orang yang melibatkan diri didalamnya, tanpa adanya sesuatu unsur *schuld* (kesalahan) pada diri mereka masing-masing melainkan hanya terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa, hingga cara berpikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa-peristiwa semacam itu dibandingkan dengan ancaman-ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sejenis.<sup>54</sup>

Namun, perbuatan terdakwa didasarkan pada adanya niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama dan tidak dalam kondisi kerusuhan sehingga terdapat unsur kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan kekerasan. Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 346.

<sup>55</sup> Tongat. *Op.cit.* Hlm. 199.

Berdasarkan batasan tentang kesalahan yang diberikan Simons tersebut tersimpul, bahwa untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>56</sup>

1. Untuk adanya “kesalahan” harus ada “keadaan batin” yang tertentu dari si pembuat. Keadaan batin yang tertentu tersebut menurut Tongat adalah keadaan batin yang normal, yaitu keadaan batin atau “jiwa” yang tidak “cacat” baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya “kesalahan” juga harus ada hubungan antara keadaan batin si pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat “dicela” atas perbuatannya.

Dengan konsepsi seperti ini, maka dasar untuk adanya “kesalahan” hakikatnya adalah “pencelaan” dari masyarakat. Artinya, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dimana karena perbuatan itu si pelaku “dicela” oleh masyarakat, maka berarti dalam diri si pelaku itu terdapat “kesalahan”. Dalam hal ini pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya, bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>57</sup>

Hubungan yang sedemikian rupa itu berupa sikap “menghendaki” atau “tidak menghendaki”. Dalam hal hubungan batin itu berupa “menghendaki”, maka bentuk kesalahan si pelaku adalah

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 200.

<sup>57</sup> *Ibid.*

“kesengajaan”. Sedang apabila hubungan batin itu berupa “tidak menghendaki”, maka bentuk kesalahan pelaku (bisa) berupa kelalaian atau kealpaan.<sup>58</sup>

Penerapan pasal 170 KUHP terhadap kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama yang pada prinsipnya diterapkan dalam situasi kerusuhan. Sehingga terdapat ketidaksinambungan dalam penerapan pasal 170 KUHP yang diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn. Majelis Hakim cenderung menerapkan pasal 170 ayat (2) angka ke-3 KUHP lantaran tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berkata demikian.

Terdapat pasal lain dalam KUHP yang menjelaskan terkait dengan kekerasan secara bersama yaitu Pasal 358 KUHP yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya adalah mati.

Jika rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 358 KUHP tersebut diatas dijabarkan dalam unsur-unsur, maka akan memperoleh perincian unsur-unsur sebagai berikut,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

1. Unsur subjektif : Dengan sengaja
2. Unsur objektif
  - a. Turut serta
  - b. Pada suatu penyerangan atau perkelahian
  - c. Dalam penyerangan atau perkelahian mana
  - d. Telah terlibat
  - e. Berbagai orang
  - f. Telah menyebabkan
  - g. Luka berat pada tubuh atau kematian seseorang

Kejahatan diatas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian dimana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.<sup>59</sup>

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni dimana terlibat beberapa orang. Perbedaanya ialah bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm. 46.

perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Pasal 358 KUHP diterapkan terhadap orang yang turut serta dalam suatu perkelahian atau penyerangan. Sehingga suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 358 KUHP yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak lama setelah dilakukan penyerangan atau perkelahian oleh orang lain. Perbuatan pelaku yang memenuhi unsur-unsur pasal 358 KUHP tidak bersinggungan dengan penyerangan atau perkelahian yang terjadi terlebih dahulu. Misalnya ketika si-A menyerang atau berkelahi dengan si-B, si-C melihat perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh si-A terhadap si-B. Kemudian karena si-A adalah teman si-C maka si-C ikut serta untuk memukul atau menyerang si-B.<sup>61</sup>

Berbeda dengan pasal 170 KUHP yang perbuatan melakukan kekerasan tersebut memang secara bersama-sama dan dilakukan di tempat terbuka. Kekerasan secara bersama-sama diartikan tidak terdapatnya atau pendeknya jarak waktu antara perbuatan kekerasan yang satu dengan yang lain. Misalnya ketika si-A dan si-C sedang bercengkrama dipinggir jalan, tiba-tiba mereka melihat si-B di seberang jalan. Karena si-A dendam dengan si-B maka si-A mengajak

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Darwanto, Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn (Sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru). 24 Februari 2017.

si-C untuk melakukan kekerasan terhadap si-B. Sehingga si-A dan si-C melakukan perbuatan kekerasan yaitu memukul si-B secara bersamaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara pasal 170 KUHP dengan pasal 358 KUHP yaitu terletak pada adanya unsur kesalahan dan bentuk dari tindakan kekerasan yang dilakukan.<sup>62</sup>

Menurut Penulis, penerapan pasal 358 KUHP harus didahului dengan adanya suatu perbuatan pidana lain. Sehingga pasal 358 KUHP dalam penerapannya tidak dapat berdiri sendiri, harus ada perbuatan pidana sebelumnya. Pidana sebelumnya yang dimaksud adalah penganiayaan, mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 357 KUHP. Jika pasal 358 KUHP ingin diterapkan maka pasal 353 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan Berencana yang menyebabkan kematian lebih sesuai jika diterapkan terhadap terdakwa sebagai pidana sebelumnya. Sedangkan teman-teman terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya memenuhi unsur-unsur pasal 358 ayat (2) KUHP karena mereka hanya turut serta atas penganiayaan berencana yang dilakukan oleh terdakwa dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Pasal 353 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

3. Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>63</sup> Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - a. Rasa sakit pada tubuh, dan/atau
  - b. Luka pada tubuh.

Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur pasal 353 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian, yaitu :

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Secara berencana;
4. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: meninggalnya orang lain.

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm. 10.



Perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 353 ayat (3) KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.

Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang dilakukan terhadap korban sehingga terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

2. Adanya perbuatan.

Terdakwa telah memukul bagian kepala korban dengan menggunakan tangan kosong.

3. Secara berencana.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur direncanakan lebih dulu. Terdakwa juga memiliki peran penting dalam terjadinya penganiayaan dan terdakwa telah menyuruh pelaku lainnya untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa atas perbuatan yang dilakukannya. Pada dasarnya istilah direncanakan mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yakni :<sup>64</sup>

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm. 27.

akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri).

- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikir-pikir, memikirkan, yakni antara lain:

- 1) Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu risiko/akibat yang didasarnya baik bagi dirinya maupun orang lain, ataukah ia tidak akan meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu;
- 2) Apabila ia sudah berketepatan hati untuk melaksanakan kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakannya;
- 3) Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, dan lain sebagainya, yang segala hal/sesuatu yang dipikirkannya itu adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi.

- c. Dalam melaksanakan perbuatannya (yang telah menjadi keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya ketika melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.
4. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: meninggalnya orang lain.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menyebabkan korban Devi Pra Oktorafianto meninggal dunia berdasarkan keterangan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 15.018/I tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngesti Lestari, SH, SpF (K) selaku dokter Spesialis Forensik yang telah menyimpulkan dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia oleh karena pendarahan pada batang otak, pendarahan di bawah selaput laba-laba otak, pendarahan dibawah selaput tebal otak, karena patah tulang atap dan dasar tengkorak akibat kekerasan benda tumpul pada kepala.

**B. Analisis Pemenuhan Aspek Keadilan dalam Pertanggungjawaban Pidana yang Dijatuhkan terhadap Terdakwa Perkara Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn.**

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>65</sup>

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Terdakwa yaitu Sukirno alias Cubung dalam putusan Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn tentang perkara tindak pidana kekerasan secara

---

<sup>65</sup> L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm.129.

bersama dikenakan dakwaan kedua primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mereka,
2. Yang secara terbuka,
3. Yang secara harafiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
4. Melakukan kekerasan,
5. Terhadap orang-orang atau barang-barang.
6. Menyebabkan suatu kematian

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Kemudian Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana (sanksi) terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Sifat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Davi Pra Oktarafianto meninggal dunia.
  - b. Terdakwa pernah dihukum.
  - c. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya.

Sehingga atas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini mengadili yang intinya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan beberapa keterangan saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa hanya melakukan pukulan sebanyak satu kali terhadap korban yaitu Devi Pra Oktorafianto.<sup>66</sup> Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan pelaku lainnya yang masuk akal jika perbuatannya dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti perbuatan saksi Rijalul Muhyidin alias Jalul yaitu menghantamkan 1 (satu) bongkahan cor atau beton kearah bagian belakang kepala korban.<sup>67</sup>

Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan terdakwa dapat dihukum lebih berat jika dibandingkan dengan putusan pidana penjara selama 6 tahun, yaitu:

1. Terdakwa merupakan penentu terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama karena sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, terdakwa diberitahukan terlebih dahulu oleh adiknya yaitu Agus mengenai keberadaan korban. Terdakwa dapat menanggapi pemberitahuan dari adiknya untuk tidak menghampiri korban, bahkan terdakwa dapat menasihati adiknya untuk tidak memperpanjang

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn. Tanggal 28 Juli 2015. Hlm. 65-66.

<sup>67</sup> Ibid. Hlm. 66.

urusannya sehingga tindak pidana kekerasan secara terbuka dan secara bersama dapat dicegah.<sup>68</sup>

2. Terdakwa juga telah menyiapkan berbagai upaya untuk dapat menutupi perbuatannya dengan menyuruh teman-temannya untuk tidak mengatakan kepada siapapun atas tindak pidana yang telah dilakukannya beserta teman-temannya.<sup>69</sup>

Dalam proses pengambilan putusan pidana, hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin Ketua Sidang/Ketua Majelis yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Pertanyaan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang hal materiil yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, seperti:

1. Apakah Pengadilan Negeri dimana Majelis Hakim bersidang berwenang memeriksa perkara tersebut;
2. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat;
3. Apakah dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan *ne bis in idem* dan *verjaring*.

Setelah hal formil itu dilanjutkan dengan materi perkara, misalnya:

---

<sup>68</sup> Ibid. Hlm. 65.

<sup>69</sup> Ibid. Hlm. 67.

- a. Perbuatan mana yang telah terbukti di persidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan apa alat bukti yang mendukungnya serta nama yang tidak terbukti;
- b. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;
- c. Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>70</sup>

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn hanya mendalami dakwaan kedua primer yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan kedua primer yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum identik dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim, karena dakwaan kedua primer sudah dibuktikan maka dakwaan lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan. Padahal menurut pasal 182 ayat (4) bahwa dalam musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana untuk terdakwa harus didasari atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Maka yang dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta-fakta persidangan), bukan hanya melalui surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang didalamnya berisi tuntutan tentang penjatuhan pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Leden Marpaung, 2011. *Op.cit.*. Hlm. 130.

<sup>71</sup> Ketut Darpawan, *Pengaruh Surat Tuntutan Pidana Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan*, <http://www.hukumpedia.com>, diakses 15 Maret 2017.



Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa dengan pasal 353 ayat (3) KUHP. Majelis Hakim tidak dapat memutus perkara terhadap terdakwa dengan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim ibarat memasak dari bahan-bahan yang telah disediakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat menambah pasal yang telah diajukan ke pengadilan.<sup>72</sup>

Majelis Hakim menilai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal 170 KUHP terhadap terdakwa sudah tepat jika ditinjau dari unsur perbuatannya yaitu melakukan kekerasan di tempat terbuka dan bersama-sama secara bersamaan, dalam arti perbuatan kekerasan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain termasuk terdakwa tidak memiliki jangka waktu yang lama. Berbeda dengan unsur perbuatan dalam pasal 358 KUHP yang harus didahului oleh perbuatan pidana lainnya dan keturutsertaannya berada dalam jangka waktu yang lebih lama daripada perbuatan kekerasan bersama dalam pasal 170 KUHP.<sup>73</sup> Selain itu penafsiran Majelis Hakim terkait kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau didepan umum dalam pasal 170 KUHP yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan secara terbuka atau di depan umum konteksnya dapat dilihat oleh orang lain, tidak didalam ruangan atau ditempat tertutup yang tidak terlihat oleh orang lain.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Darwanto. Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn (Sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru). 24 Februari 2017.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Ketika seorang terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, mampu bertanggungjawab dan kemudian dijatuhi pidana, sebagian hakim ternyata memiliki kecenderungan pendapatnya tergantung pada isi dari surat tuntutan pidana penuntut umum. Secara teknis, muncul kebiasaan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut oleh penuntut umum. Terkadang muncul pula keraguan ketika hendak menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan pidana. Para hakim telah menyadari diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ppidanaan, harus dikaitkan pula dengan asas legalitas yakni *Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Dengan demikian, berarti hakim bebas menentukan sanksi pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Namun, dengan ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pidana di berbagai undang-undang yang memberikan batasan minimal dan/ atau maksimal yang terlalu besar di satu sisi, dan banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan di sisi lain, menyulitkan hakim untuk menentukan pidana. Jika memutuskan akan menjatuhkan pidana penjara, maka harus menentukan berapa lama (hitungan tahun, bulan, atau hari). Jika akan

menjatuhkan pidana denda, maka akan menentukan berapa rupiah jumlah dendanya.<sup>75</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan pemidanaan yaitu,

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>76</sup>

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah: “siapa membunuh harus dibunuh”, teori mana yang disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*).
2. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat memertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana yang disebut teori memertakutkan (*afchrikkings-theorie*).
3. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman dijatuhkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.

---

<sup>75</sup> Ketut Darpawan. *Op.cit.*

<sup>76</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 11.

4. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.<sup>77</sup>

Pidana penjara selama 6 tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak murni melakukan suatu kriminalitas yang artinya terdakwa tidak benar-benar memiliki niat untuk membunuh. Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan secara terbuka dan bersama-sama terhadap korban Devi Pra Oktarofianto lantaran marah karena adiknya yaitu Agus juga pernah dipukul oleh korban. Ditambah lagi menurut Majelis Hakim, terdakwa beserta korban hanya bersitegang saja namun perbuatan yang dilakukan berakibat terlalu jauh. Perbuatan terdakwa sendiri merupakan reaksi spontanitas atas luapan emosinya. Ibarat seseorang yang cenderung melakukan perbuatan pemukulan karena melihatnya rekannya juga turut serta memukul. Faktor-faktor seperti inilah yang menyebabkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun kepada terdakwa.<sup>78</sup>

Menurut Darwanto, putusan pidana penjara selama 6 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan secara terbuka dan bersama yang menyebabkan kematian sudah memenuhi aspek keadilan. Perbedaan penjatuhan hukuman itu karena kasuistis, dilihat

---

<sup>77</sup> R. Soesilo. *Op.cit.*

<sup>78</sup> Wawancara dengan Darwanto, Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn (Sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru). 24 Februari 2017.

dari latar belakang hukum, sosial, dan moral. Moral itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada dasarnya Hakim yang menjalankan profesinya selama 5 sampai 10 tahun seperti memiliki indra keenam. Ibarat nurani yang ada di dalam hati dan kalau dikeluarkan maka melegakan. Hakim selayaknya mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Ibarat montir yang sudah ahli dapat mengetahui kondisi mesin atau bagian mana yang rusak hanya dengan mendengar suara mesin yang sedang di gas. Selama hati nurani tidak dibohongi maka itu bagus dan dapat mencapai keadilan. Kecuali ada intervensi, pengaruh dan godaan sehingga membuat bisikan hati nurani tidak dituruti sehingga keadilan tidak tercapai. Hakim hanya perantara dari Tuhan atas hukuman yang dijatuhkan. Bahkan kebanyakan terdakwa merasa jera atas perbuatannya. Mereka sudah merasa bersalah. Nurani terdakwa jika dipadukan dengan nurani hakim maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Terdakwa dan korban menerima keputusan hakim selama hati nurani tidak diingkari. Jadi, ibarat A, B, C dan D benar. Pasti setiap orang akan menganggap dirinya paling benar. Namun ada yang paling benar yaitu hati nurani. Pertanggungjawaban terdakwa dalam perkara a quo bisa dikatakan diperberat hukumannya lantaran dia merupakan otak dari tindak pidana, paling dewasa, timbulnya perbuatan bermula dari terdakwa. Sedangkan pertanggungjawaban terdakwa dalam perkara a quo dapat dikatakan diringankan karena terdakwa bukan kriminal dalam artian sebenarnya terdakwa adalah orang yang baik lantaran hanya emosi.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 156/Pid.B/2015/PN.KPn menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap terdakwa dilatarbelakangi karena terdakwa tidak sepenuhnya berniat untuk melakukan perbuatan jahat terhadap korban. Perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang spontan atas reaksi dari perbuatan korban yang memukul adik terdakwa. Namun perbuatan terdakwa berdampak terlalu jauh sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan latar belakang hukum, sosial dan moral. Sehingga ketiganya harus berjalan beriringan. Majelis Hakim harus memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus memberikan dampak yang positif bagi pelaku, serta dalam menjatuhkan putusan harus disertai dengan hati nurani yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Namun hal tersebut bukan berarti bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus selalu taat dan patuh terhadap pasal-pasal baik yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Memang Majelis Hakim harus memutuskan perkara pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tapi lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa juga merupakan kewenangan Majelis Hakim. Dalam setiap pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana pasti terdapat jumlah maksimal lamanya

waktu pidana penjara yang diterapkan terhadap terdakwa. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 156/Pid.B/2015/PN.KPn kurang berani dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa. Majelis Hakim justru menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim juga tidak mengetahui bahwa pasal 170 KUHP hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan secara terbuka dan bersama yang dilakukan dalam kondisi kerusuhan. Majelis Hakim kurang mengetahui pendapat-pendapat para ahli terkait pasal 170 KUHP. Sehingga Majelis Hakim cenderung lebih mengutamakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta tanggapan subjektif atas kasus yang dia tangani dengan meninggalkan tuntunan-tuntunan atau referensi lainnya yang dapat menambah kualitas dari putusan yang akan dikeluarkan.

Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Sedangkan dalam pasal 170 ayat (2) angka ke-3 KUHP memiliki ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika memang Majelis Hakim konsisten dengan pasal-pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 338 KUHP atau Pasal 170 KUHP maka terdakwa seharusnya mendapat hukuman penjara setidaknya tidak terlampau jauh dari hukuman penjara selama 9 tahun.

Penjatuhan pidana penjara selama 6 tahun terhadap terdakwa dirasa kurang memenuhi unsur keadilan khususnya bagi korban. Pidana penjara

paling ringan dalam pasal 170 KUHP adalah maksimal 7 tahun, itupun jika perbuatan kekerasan secara terbuka dan bersama-sama baik terhadap orang maupun barang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan matinya orang. Sehingga seharusnya terdakwa dipidana penjara lebih dari 7 tahun karena pidana penjara selama 7 tahun dalam pasal 170 KUHP merupakan batas maksimal pidana penjara yang hanya menyebabkan atau mengakibatkan luka-luka.

Perbandingan lamanya pidana penjara antara pasal 170 ayat (2) angka ke-1 KUHP yaitu maksimal 7 tahun dengan pasal 170 ayat (2) angka ke-3 yaitu maksimal 12 tahun terlampau jauh. Apalagi jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun yang bahkan tidak memenuhi batas maksimal dalam pasal 170 ayat (2) angka ke-1 KUHP yang hanya menyebabkan luka-luka.

Dalam beberapa uraian diatas maka seharusnya terdakwa dihukum lebih berat dari *vonnis* pidana penjara selama 6 tahun yang disebabkan antara lain :

1. Terdakwa merupakan penentu terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama yang menyebabkan matinya korban. Ditambah lagi, terdakwa tidak menenangkan adiknya yang telah dianiaya terlebih dahulu oleh korban. Terdakwa justru memprovokasi adiknya untuk menunjukan siapa yang berkuasa di daerah tempat tinggalnya.
2. Terdakwa telah turut andil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama yang menyebabkan korban meninggal dunia



walaupun hanya memukul sebanyak satu kali di bagian belakang kepala korban.

3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
4. Terdakwa adalah residivis atau pernah dipenjara sebelumnya.
5. Perbandingan pasal 170 ayat (2) angka ke-3 yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama dan terbuka terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 dengan pidana penjara yang didapatkan oleh terdakwa yaitu selama 6 tahun masih terlampau terlalu jauh, mengingat dalam pasal 170 ayat (2) angka ke-1 yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama dan terbuka yang menyebabkan hancurnya barang atau luka-luka mendapat ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.